



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN & PERIKANAN

Paparan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018

1 Agustus 2018

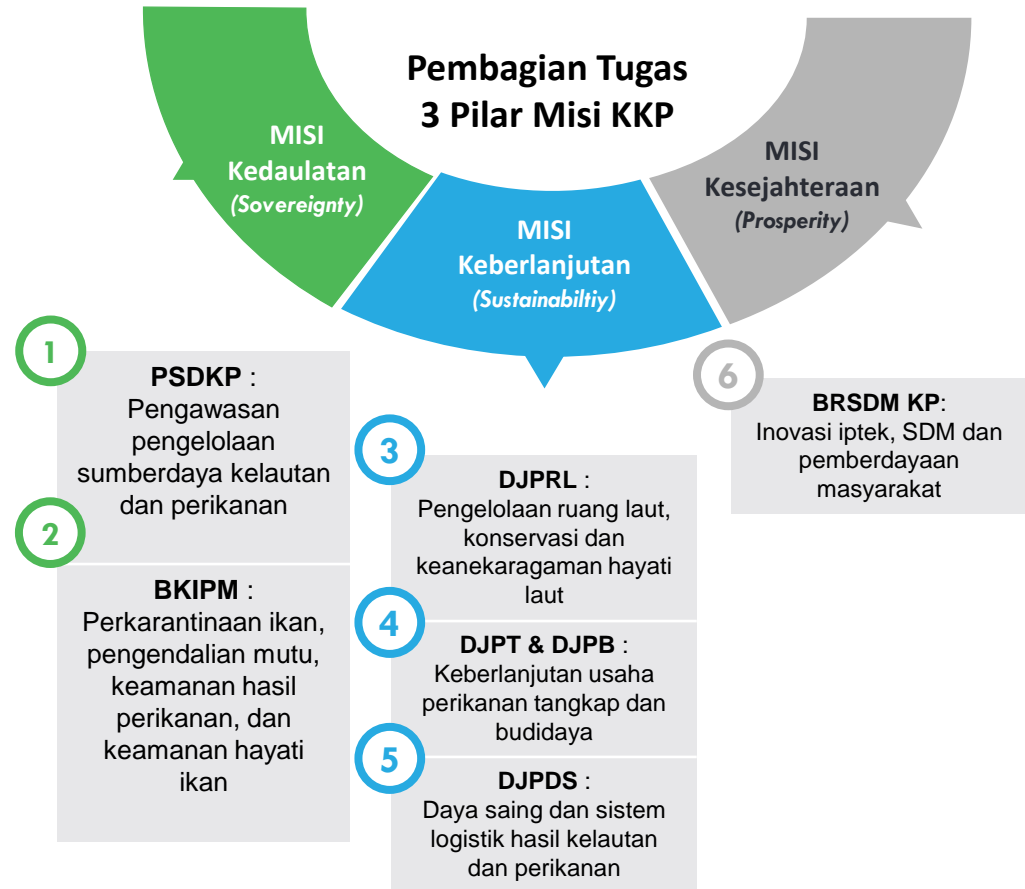
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Misi KKP dalam mencapai visi Pemerintah “Laut Masa Depan Bangsa”



**“LAUT ADALAH MASA
DEPAN BANGSA”**

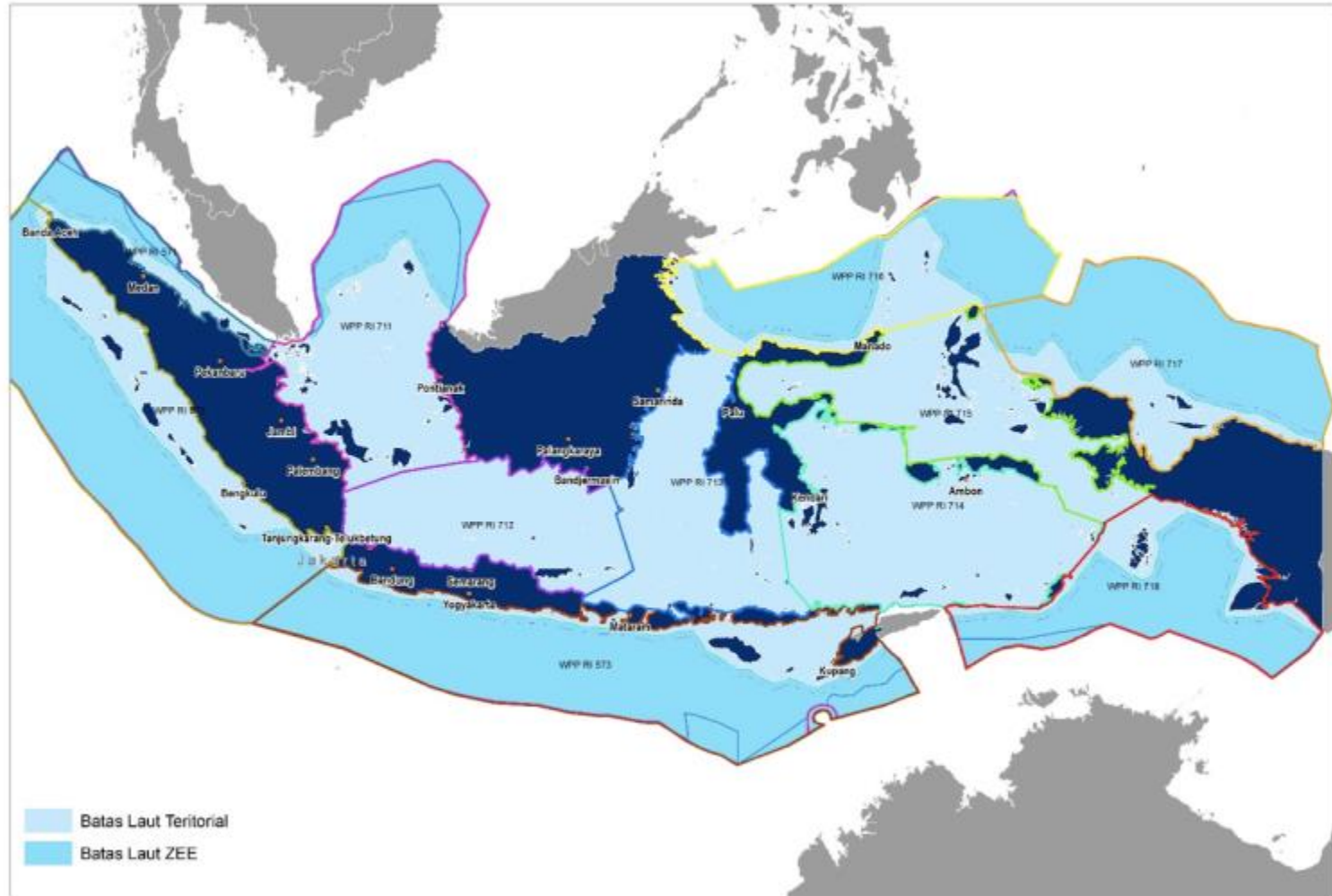
Presiden Joko Widodo,
Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014



Potensi Laut Indonesia Besar, Namun Belum Teroptimalkan

Dua pertiga wilayah NKRI adalah laut (5,8 juta km²) dan garis panjang pantainya terbesar ke-2 di dunia (95.181 km)

Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ketentuan 1982 LOSC



Satu dari Tiga Anak Indonesia Mengalami Stunting

Peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gizi anak



Children from a traditional village in Sumba Island, East Nusa Tenggara.
©UNICEFIndonesia/2014/Hasan

Kondisi Kekurangan Gizi di Indonesia

Indikator	2007	2010	2013
Prevalensi anak balita yang pendek	36,8	35,6	37,2
Prevalensi anak balita yang kurus & sangat kurus	13,6	13,3	12,1
Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) < 2500 gr	11,5	11,1	10,2

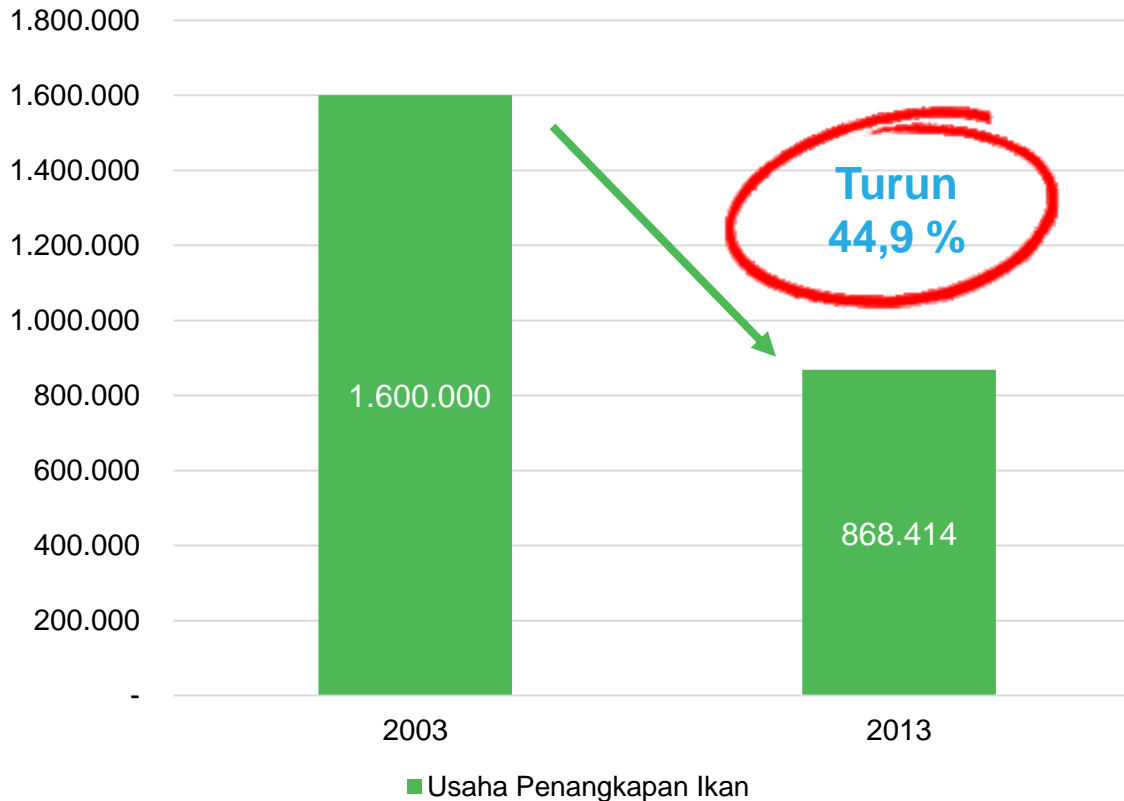
Sumber: Riskesdas, 2013

Hampir 9 juta anak Indonesia di bawah 5 tahun terlalu pendek untuk usianya

Dalam 10 Tahun Terakhir, Mata Pencaharian Nelayan Menghilang

Terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Nelayan dalam Sensus Pertanian BPS

Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan 2003-2013



Sumber: Sensus Pertanian BPS 2003 & 2013



Nelayan pintur kepiting



Nelayan ketinting

Langkah Awal Diplomasi Melawan IUU Fishing

Pertemuan dengan Enam Duta Besar untuk Menjalin Komitmen bahwa IUUF adalah Musuh Bersama



Pemberantasan *IUU Fishing*

PENENGGELAMAN
363 Kapal Ikan *Illegal*
 s/d tahun 2017

Peta jalan pengelolaan usaha
 perikanan tangkap

**GOOD
GOVERNANCE**

Pembatasan
 Penangkapan Lobster,
 Kepiting & Rajungan
 untuk ukuran & kondisi
 tertentu
 Permen KP No. 1/2015

Pelarangan
 penggunaan alata
 tangkap Pukat Hela &
 Pukat Tarik
 Permen KP No. 2/2015



Larangan Alih Muatan
 di tengah laut untuk ke
 luar negeri
 Permen KP No. 57/2014



Analisis dan
 Evaluasi 1.132
 Kapal Eks Asing

PENANGANAN kasus
 Perbudakan Benjina :
1020 org



*Ratification of Port
 State Measure
 Agreement (PSMA)*

Joint Communique
 Indonesia – Sudan, Australia,
 Norway, Palau, Papua New
 Guinea, Timor Leste, Russia, New
 Zealand, India, Sri Lanka,
 Bangladesh

Usaha
 Penangkapan
 Ikan hanya untuk
 100% PMDN
 Perpres 44/2016

Pengaturan Kapal
 Pengangkut Ikan
 Hidup & pelabuhan
 muat singgah
 Permen KP No.
 15/2016

Peningkatan Layanan
 Perizinan:
 memangkas waktu &
 dokumen proses
 perizinan melalui
 PTSP, Gerai Perizinan
 di Daerah & layanan
 Online



**Moratorium izin untuk
 kapal eks-asing**
 Permen KP No. 56/2014



Pembentukan Satgas 115
 (Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas
 Pemberantasan Ikan secara Illegal)

Negara Menyelamatkan Uang dari Penyelundupan Subsidi BBM Ilegal untuk Kapal Asing

Antrian BBM untuk Nelayan



Transshipment di Tengah Laut



MV Viking

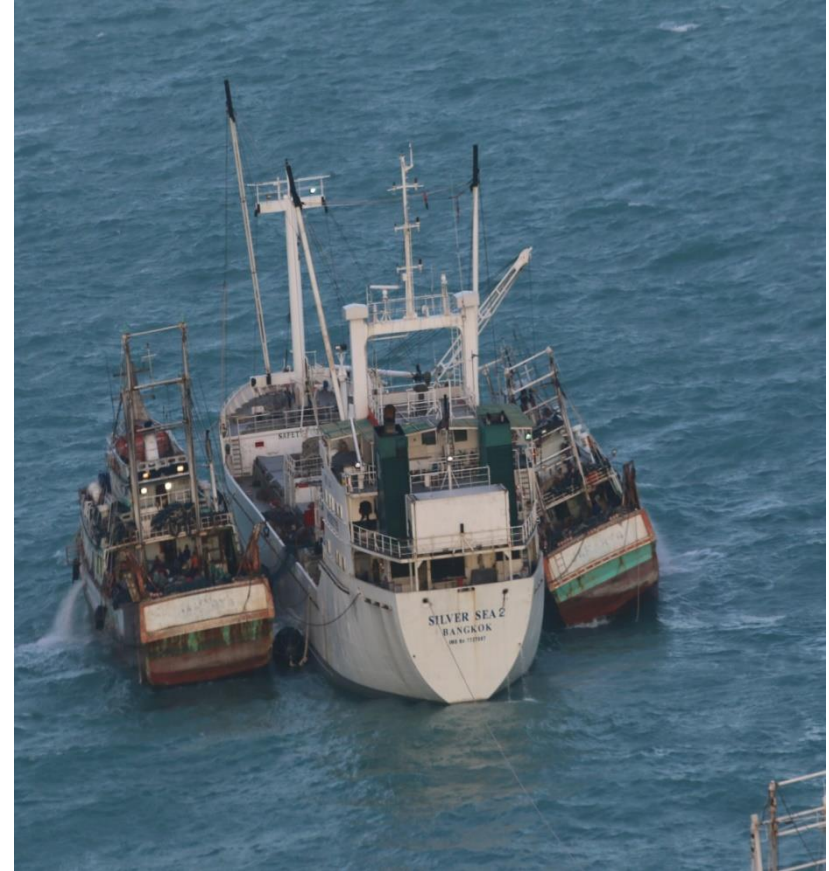
Monumen illegal fishing di Pangandaran setelah MV Viking dikandaskan



Penegakkan hukum Kapal Silver Sea 2



- dugaan penggunaan sikpi palsu/pemalsuan dokumen
- *transshipment* ilegal di wilayah PNG (ekspor ikan tanpa sertifikat kesehatan ikan; ekspor ikan tanpa izin kepabeanan)
- pemalsuan dokumen pelayaran kapal
- mematikan VMS dan AIS saat berlayar
- penggunaan alat tangkap terlarang (*pair trawls*)



Kapal STS-50 berukuran 570 GT,
kapal buronan INTERPOL yang tertangkap di wilayah perairan Indonesia



Kisah Nelayan mengenai “Kota di tengah Laut”

Banyaknya kapal asing yang menangkap di Laut Arafura terlihat dari terang lampu yang ditangkap citra satelit NASA. Semenjak moratorium kapal asing, nelayan lokal yang mengisi wilayah penangkapan WPP 718

Gambar Satelit Malam Hari, Akuisisi Tahun 2012 (NASA)

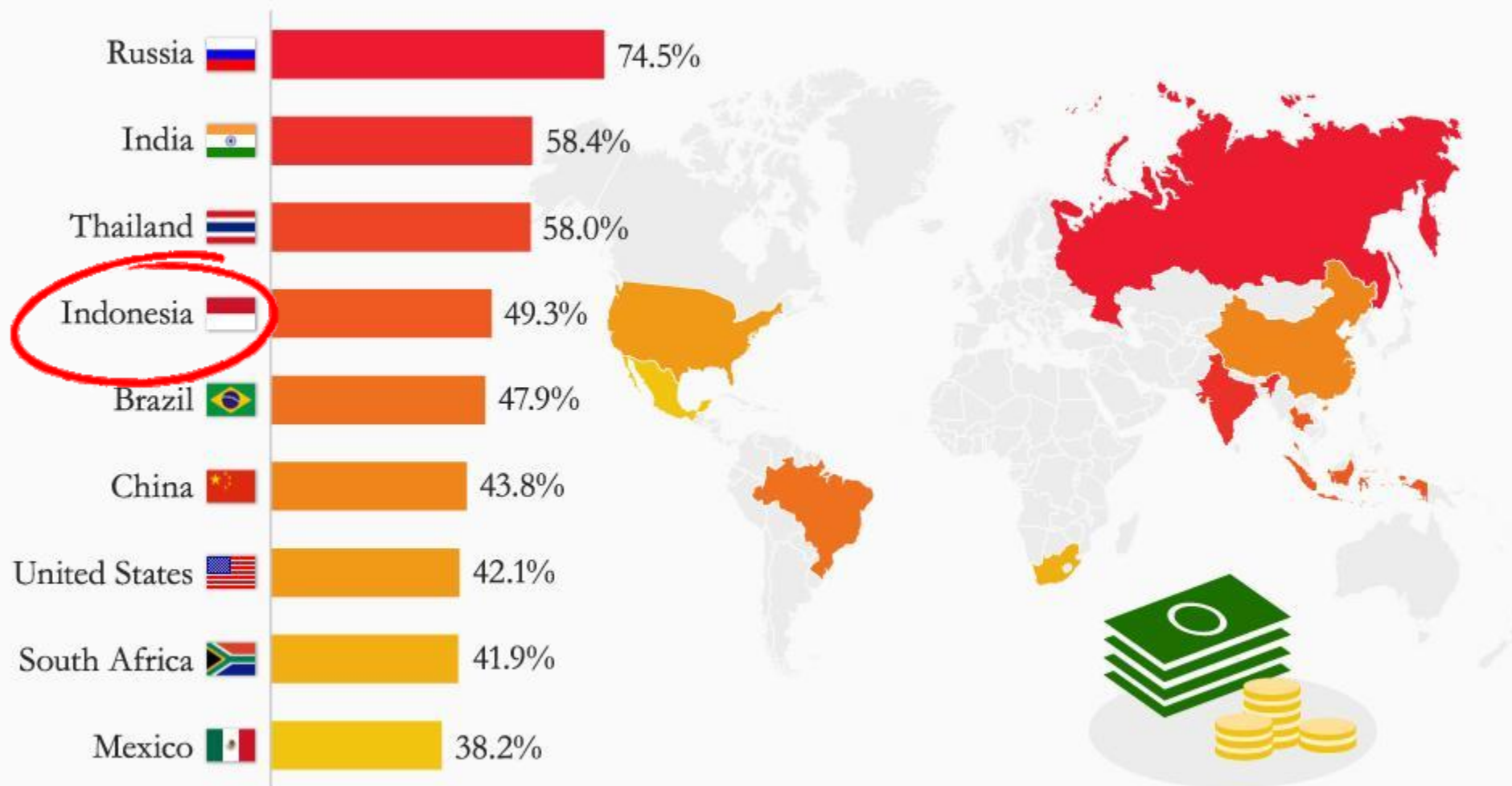


Gambar Satelit Malam Hari, Akuisisi Tahun 2016 (NASA)



The world's most unequal countries

Share of total wealth of richest 1% in selected countries in 2016



Gambaran Kemiskinan & Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Statistik Kemiskinan & Pemerataan Pendapatan di Indonesia

	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan Relatif (% penduduk)	11.7	11.5	11.0	11.2	10.9 ¹
Kemiskinan Absolut (juta orang)	29	29	28	29	28 ¹
Koefisien Gini Gini Rasio	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39 ¹

Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi (persen)

Provinsi	Orang Miskin ¹
Papua	28.5%
Papua Barat	25.4%
Nusa Tenggara Timur	22.2%
Maluku	19.2%
Gorontalo	17.7%

¹ persentase berdasarkan total penduduk per provinsi bulan Maret 2016

Provinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi (juta orang)

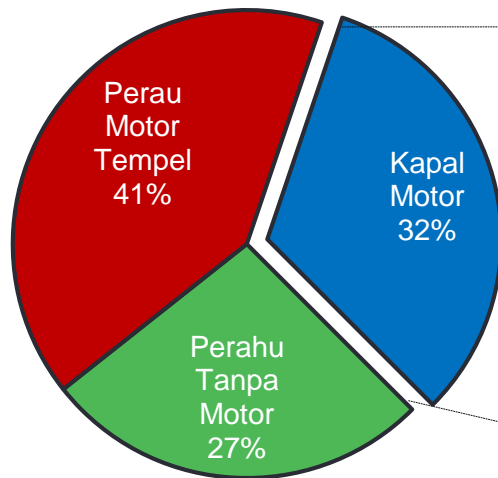
Provinsi	Orang Miskin
Jawa Timur	4.78
Jawa Tengah	4.51
Jawa Barat	4.49
Sumatra Utara	1.51
Nusa Tenggara Timur	1.16



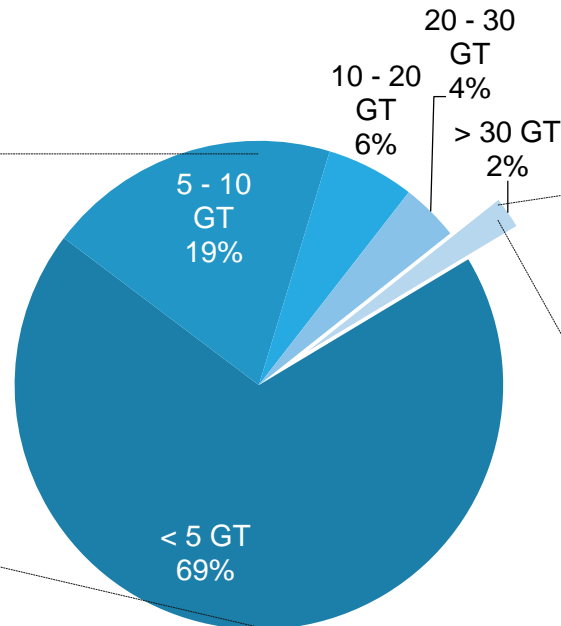
Mayoritas Nelayan di Indonesia adalah Nelayan Kecil

Kapal Ikan eks-asing hanya sebagian kecil dari armada kapal perikanan di Indonesia

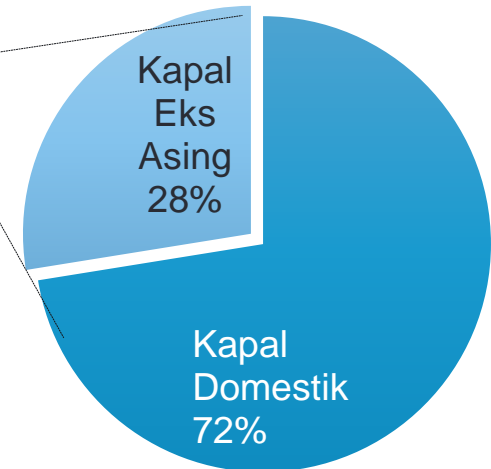
Armada Perikanan Nasional



Armada Kapal Motor



Kapal Motor > 30 GT



Sumber: Buku Statistik Perikanan Tangkap, 2013

Surat Edaran Menteri Kelautan & Perikanan, 7 November 2014

Pembebasan PHP bagi Kapal Ikan < 10 GT dan Penghentian Alat Tangkap yang Merusak Lingkungan


**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3.6.2.3/Per-44/2014
Sifat : Segera
Hal : Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi Kapal Perikanan dengan Ukuran 10 GT ke bawah dan Penghentian Operasionalisasi Alat Penangkap Ikan yang Merusak Lingkungan dan Konservasi Perairan Laut

Jakarta, 7 November 2014

Kepada Yth.
1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

Di Tempat

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian perairan laut, maka mulai tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membebaskan pungutan hasil perikanan (PHP) bagi kapal perikanan yang berukuran 10 GT ke bawah dan akan menghentikan operasionalisasi Alat Penangkap Ikan yang merusak lingkungan serta terus memperbaiki lingkungan perairan laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat untuk Saudara Bupati dan Walikota agar menghilangkan berbagai jenis pungutan kepada kapal perikanan yang berukuran 10 GT ke bawah.

Untuk Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota, kami mohon agar berkenan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membekukan ijin menangkap ikan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, seperti jaring arad, dogol dan yang lainnya yang masuk dalam kategori jaring pukat harimau;
2. Melakukan inventarisasi, evaluasi dan pendaftaran ulang bagi semua kapal perikanan yang ijinnya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota, dan apabila ditemukan ada yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, maka ijinnya supaya dibekukan;

3. Meninjau kembali, mengendalikan bahkan mencabut ijin usaha di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merusak lingkungan, menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan dan merugikan para nelayan;
4. Melakukan langkah-langkah konkret dalam melindungi nelayan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan;
5. Melakukan konservasi bagi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami degradasi lingkungan;

Beberapa hal tersebut diatas yang telah kami sampaikan, kiranya Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota berkenan menuangkannya dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan dilaporkan kepada kami, maka Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Saudara pimpin akan menjadi prioritas bagi luncuran bantuan-bantuan pembangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI


Susi Pudjiastuti

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Saudara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
3. Saudara Menteri Dalam Negeri
4. Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Reformasi Kebijakan Perikanan akan Meningkatkan Stock Ikan & Pendapatan

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

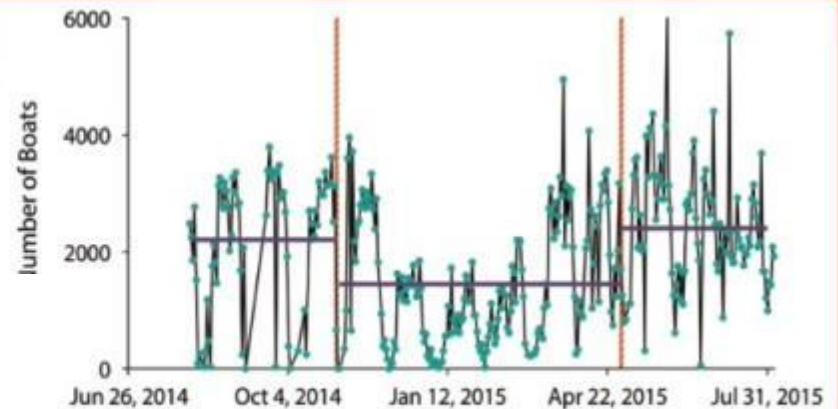
Keberhasilan Kebijakan Melawan IUUF

Di bawah direktif Menteri Susi, kebijakan Indonesia untuk memberantas IUUF dari kapal asing dan investasi untuk armada kapal skala-kecil dapat mengurangi upaya penangkapan ikan sebesar 35% (data KKP) dan akan meningkatkan tangkapan ikan dalam jangka panjang selama upaya penangkapan dalam negeri dikelola dengan baik.

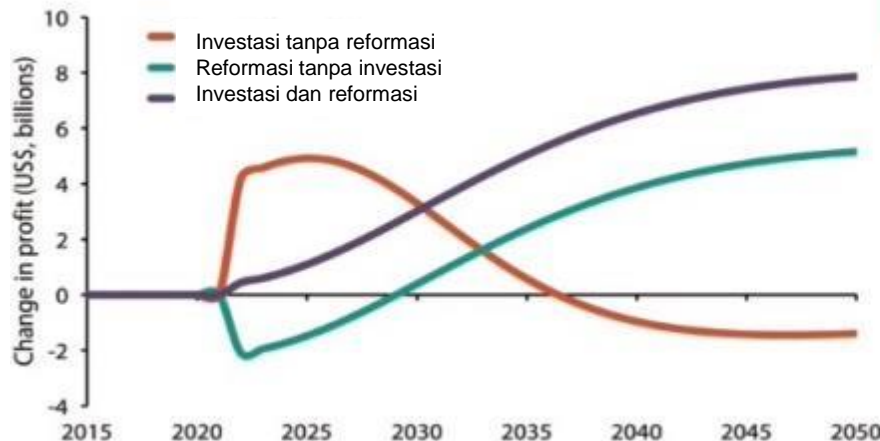
Penangkapan Skipjack tuna sampai 2035 (dibandingkan sekarang)



[^]mengurangi open access & menerapkan pengendalian perizinan



Perhitungan independen menunjukkan pengurangan upaya penangkapan ikan di malam hari setelah moratorium, namun upaya penangkapan ini tergantung meskipun ada perpanjangan setelah 30 April 2015. Dihitung oleh tim UCSB/KKP berdasarkan data dari NOAA Joint Polar Satellite System (JPSS).



*Nilai apabila dibandingkan dengan tidak adanya investasi DAN tidak ada reformasi

Perlunya Reformasi dan Investasi

- Bila investasi dilakukan tanpa reformasi, akan menyebabkan kerugian dalam jangka panjang dengan mendukung overfishing
- Reformasi perikanan tanpa investasi menyebabkan kehilangan profit dalam jangka pendek, tapi menjaga keuntungan jangka panjang karena pemulihan biomassa ikan.
- Reformasi dan Investasi, apabila dijalankan secara bersamaan, akan mencegah kerugian jangka pendek akibat pembatasan, dan memastikan sumberdaya ikan membaik dalam jangka panjang.

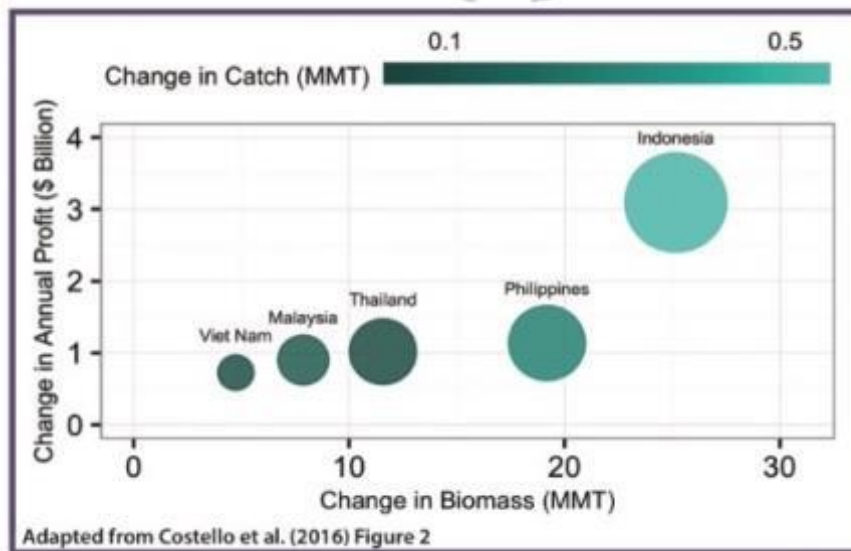
Reformasi Kebijakan Perikanan akan Meningkatkan Stock Ikan & Pendapatan

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

By 2050, global reform measures would simultaneously generate increases in fish biomass (up to **619 million metric tons**), catch (up to **16 million metric tons**), and fishery profits (up to **\$53 billion**).

Indonesia

IUU fishing and overexploitation are major concerns for the future of Indonesia's fisheries, threatening the livelihoods of 20 million Indonesians who rely on fishing. However, management reforms would considerably increase biomass, catch, and profit relative to maintaining the status quo.



Expected by 2050 with proper fishery reform



224%



Biomass



100%



Catch



\$3.7 billion



Profit

Proyeksi 2050: Bila kebijakan reformasi perikanan dilakukan secara konsisten, dapat meningkatkan **biomassa ikan 224%**, meningkatkan **tangkapan 100%**, dan **keuntungan ekonomi USD 3,7 milyar**.

Dan bila dilakukan secara global, pada 2050, biomassa ikan meningkat mencapai 619 juta metrik ton, tangkapan 16 juta metrik ton, dan keuntungan perikanan USD 53 milyar.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016: Peluang Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah berupaya menjangkau para investor domestik maupun asing melalui beragam insentif dan kemudahan bagi investasi berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar

KATEGORI USAHA

TERBUKA

Bagi investasi asing 100% tanpa ketentuan khusus



Cold Storage

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DICADANGKAN

Persyaratan dicadangkan untuk UMKMK



Pemindangan Ikan

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

Persyaratan tertentu seperti lokasi, besaran modal & rekomendasi lembaga terkait



**Penggalian pasir laut
(modal domestik 100%)**



Perikanan tangkap (modal domestik 100% dan izin khusus KKP)



**Budidaya koral hias
(rekomendasi KLHK)**

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN KEMITRAAN

Persyaratan bermitra dengan UMKMK



Pembenihan dan pembesaran ikan



Pengeringan, pengasapan, fermentasi & surimi



Pemasaran, distribusi & ekspor

TERTUTUP

Dilarang melakukan usaha berbentuk apapun, baik investor domestik maupun asing



Penangkapan ikan tercantum dalam CITES



Pemanfaatan koral alam



Pengangkatan muatan kapal tenggelam

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

KKP berupaya mempercepat pertumbuhan bisnis perikanan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan nelayan dan meningkatkan konsumsi ikan nasional
(2015-2017)

HULU

Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan nasional



1.410

Bantuan kapal penangkapan ikan



13.717

Bantuan alat penangkapan ikan

347,47 Juta

Benih ikan disebar



2.807

Bantuan sarpras usaha budidaya Perikanan

252

Bioflok

HILIR

Meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan

PEMBANGUNAN

361 unit Ice Flake Machine
104 paket cold storage



TERBUKA

Peluang bagi asing di **5** bidang industri pengolahan



KUALITAS

Produk diperbaiki untuk penguatan daya saing



PROMOSI

gencar dilakukan KKP setiap bulan guna memacu ekspor dan perluasan investasi

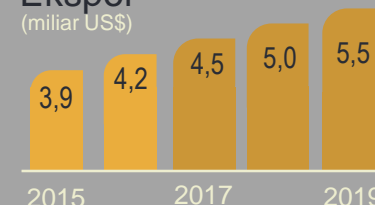


MENGENJOT TARGET

Melalui sejumlah langkah, KKP menargetkan ekspor, produksi dan kontribusi bagi ekonomi terus meningkat hingga 2019

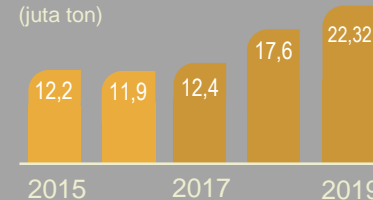
Ekspor

(miliar US\$)



Produksi Ikan

(juta ton)



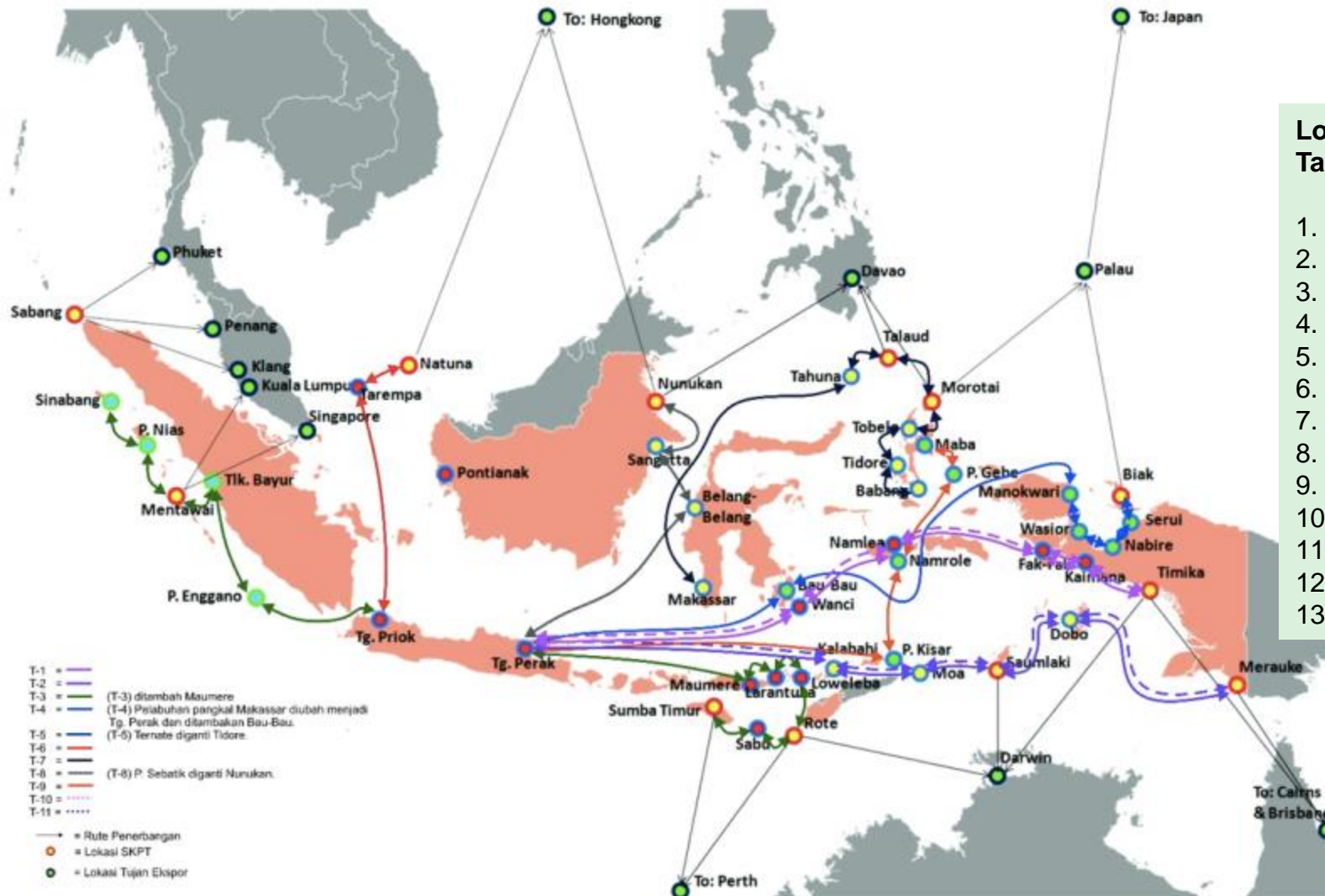
Pertumbuhan PDB Perikanan

(%)



Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT)

Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor



Lokasi 13 SKPT Tahun 2017-2018

1. Natuna
2. Saumlaki
3. Merauke
4. Mentawai
5. Nunukan
6. Talaud
7. Morotai
8. Biak Numfor
9. Mimika
10. Rote Ndao
11. Sumba Timur
12. Sabang
13. Moa

Sumber:
 - Rute Tol Laut:
 Kementerian
 Perhubungan, 2016
 - SKPT 2017: KKP,
 2016



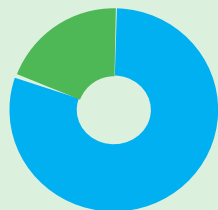
SUSINISASI

Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran

PRIORITAS

80%

Anggaran untuk
STAKEHOLDER



MUDAH DIPAHAMI



larangan
penggunaan

KATA BERSAYAP,
tidak jelas, dan rancu

Contoh: optimalisasi, pengembangan,
peningkatan, pemberdayaan,
pembangunan, penguatan dll

EFISIENSI



Cek ulang HARGA SATUAN



MENYUSUN SOP implementasi program



EFISIENSI program-program pendukung

KETERBUKAAN



PUBLIKASI
anggaran di
WEBSITE

Change of Behavior



From Business-As-Usual to :

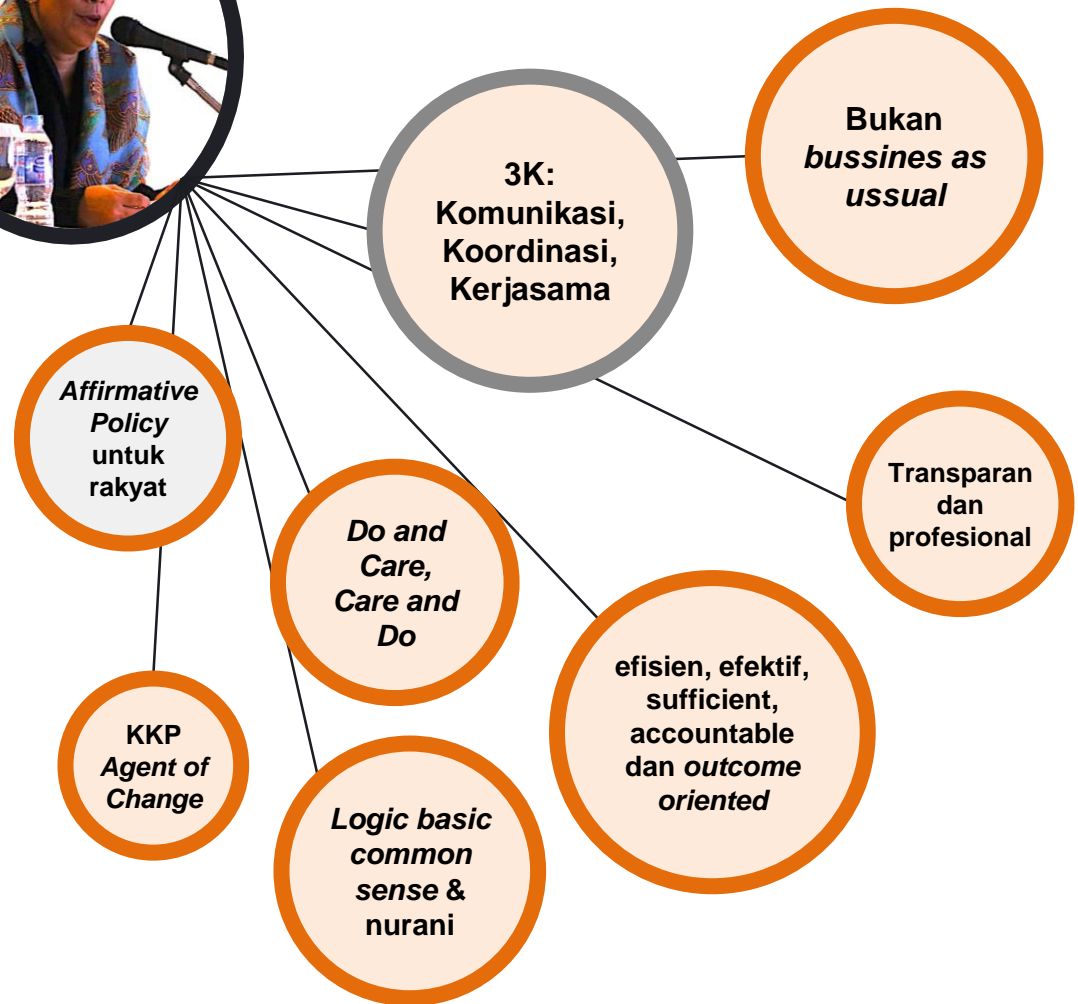
- Upload data seluruh konsesi perijinan yang dikeluarkan
- Upload data rencana anggaran APBN
- Meeting dengan semua stakeholders, baik “hitam” dan “putih”, secara terbuka, head-to-head, komprehensif, detil dan tuntas
- Media dilibatkan di setiap tahapan proses
- Membawa semua persoalan ke rasio dasar, logika, dan nurani
- Bergerak cepat, responsif, tidak menunda bila dapat dikerjakan hari ini
- WA group Eselon 1 dan Menteri, Twitter dan SMS per unit kerja untuk publik
- 24/7 availability (area excluded of human rights concession)
- Handbook dengan SOP berbasis sistem check-list
- Bekerja sama dalam basis “kerja sama-sama” dan “sama-sama kerja”
- Bersikap sebagai executive (bekerja dan melayani), bukan sebagai stakeholder atau shareholder
- Bermimpi gaji naik dan tunkin naik untuk meningkatkan kegembiraan



RETREAT KKP

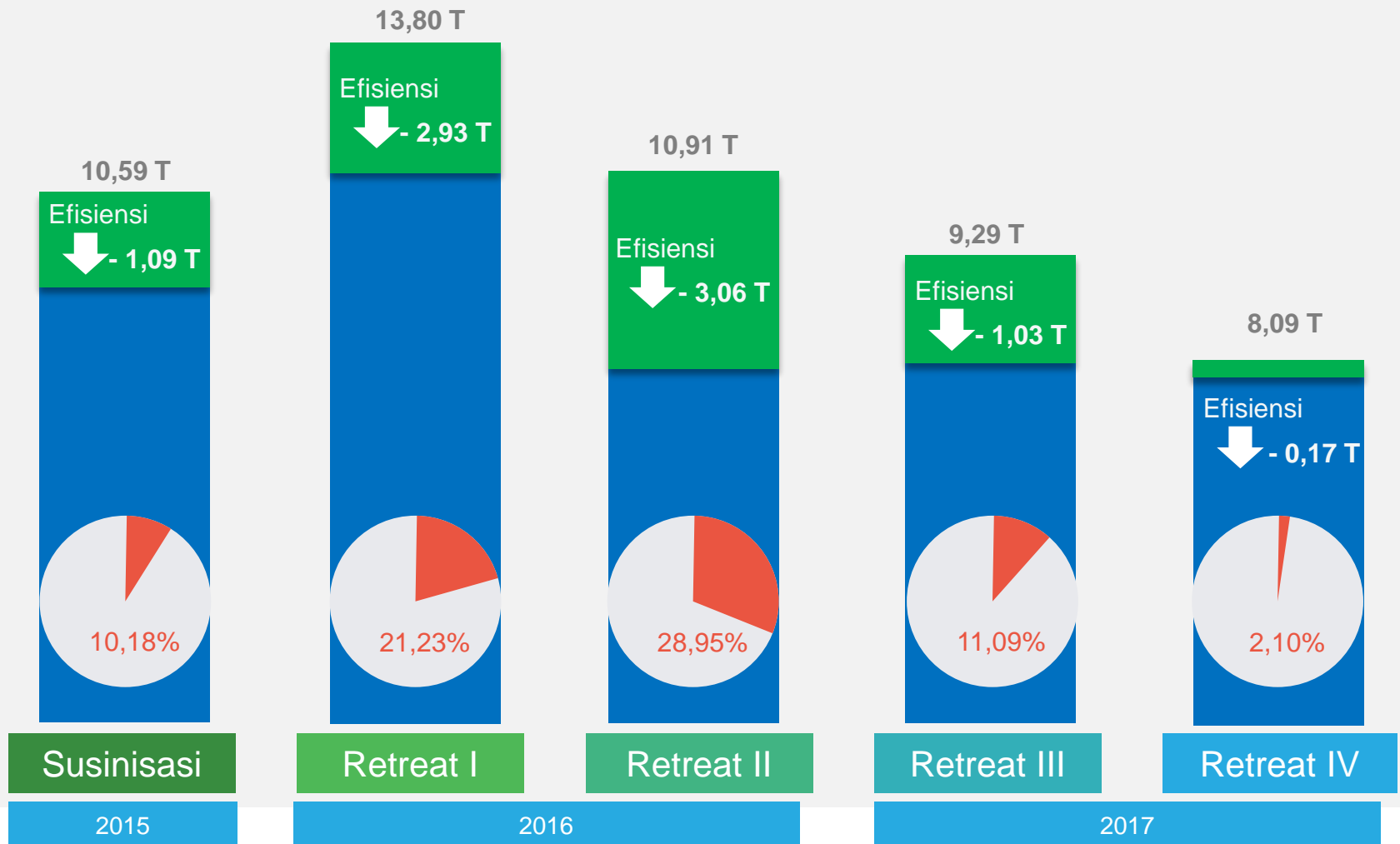


“
We Have to Change
”



EFISIENSI ANGGARAN HASIL SUSINISASI

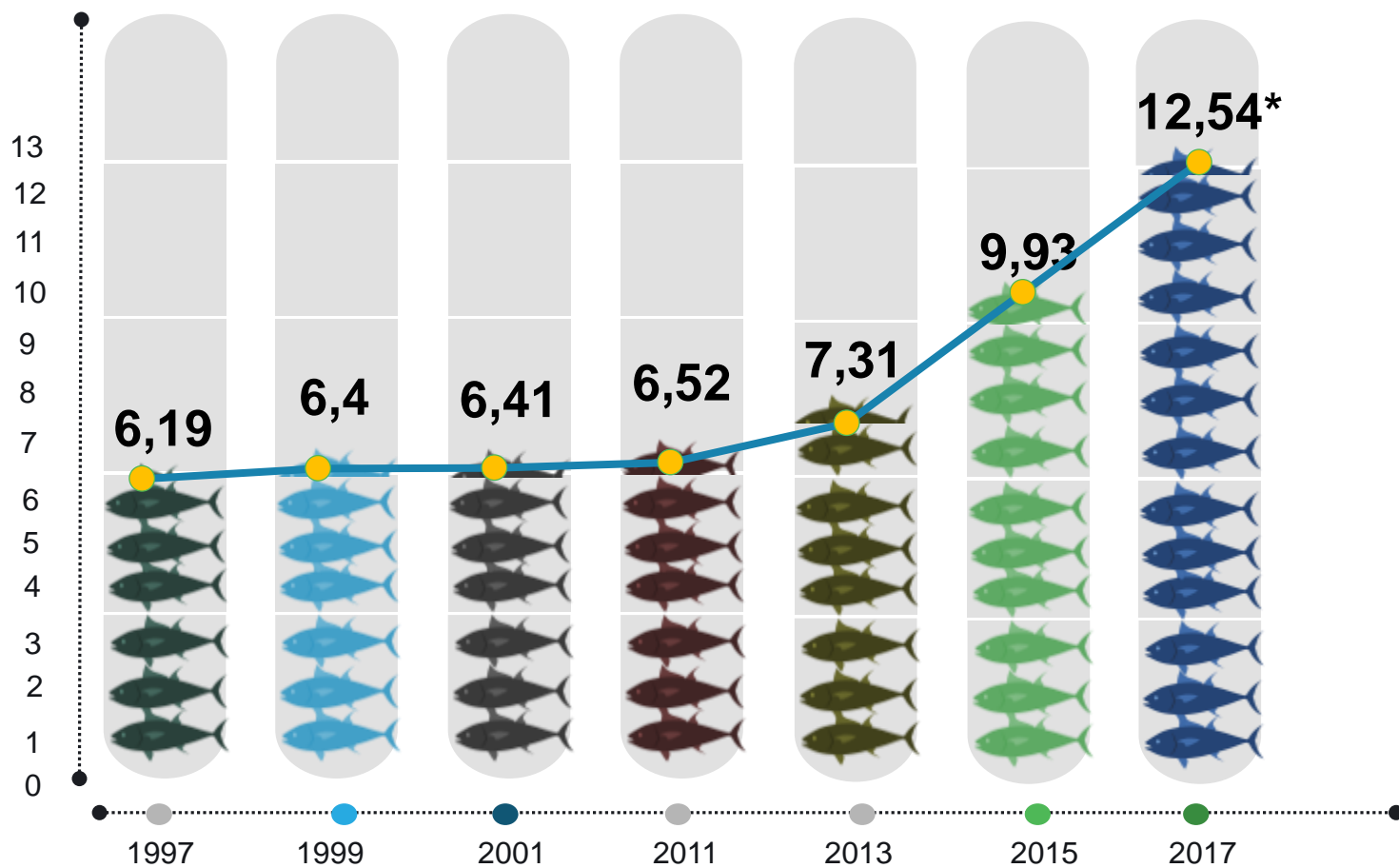
Sejak Susinisasi, KKP berhasil melakukan **penghematan anggaran** sebesar **Rp8,28 Triliun**



DAMPAK KEBIJAKAN

STOCK IKAN

Angka Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (juta ton/tahun)

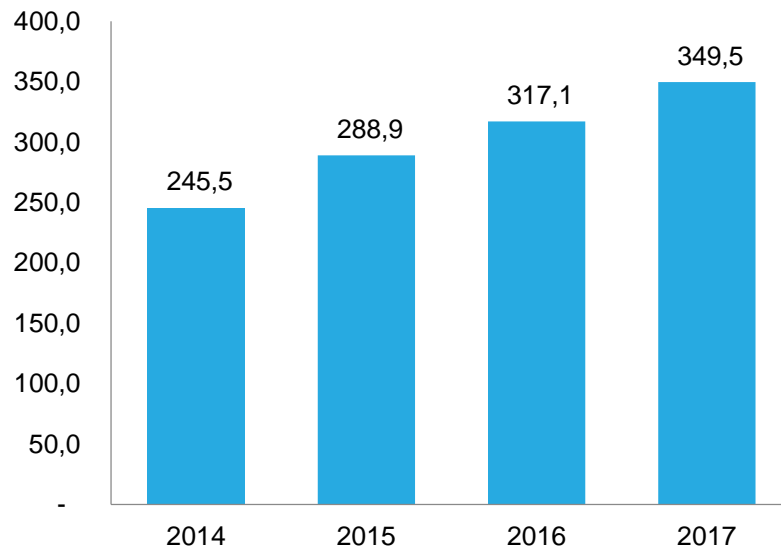


*) Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017

Perkembangan Nilai PDB Perikanan

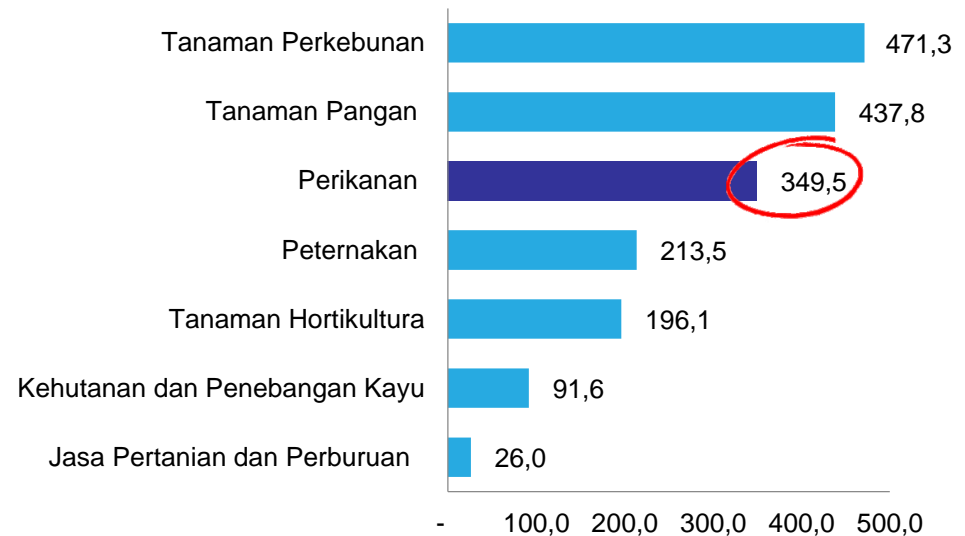
Economic Size Perikanan (Rp Triliun)

(Berdasarkan Harga Berlaku)



Perbandingan *Economic Size* Sektor Pertanian dalam Arti Luas Tahun 2017 (Rp Triliun)

(Berdasarkan Harga Berlaku)



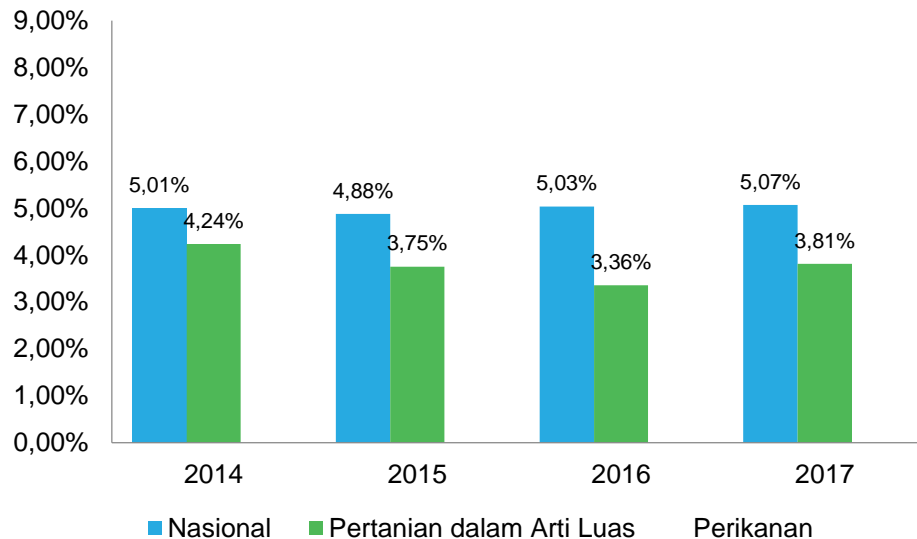
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018



Pertumbuhan PDB Perikanan

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

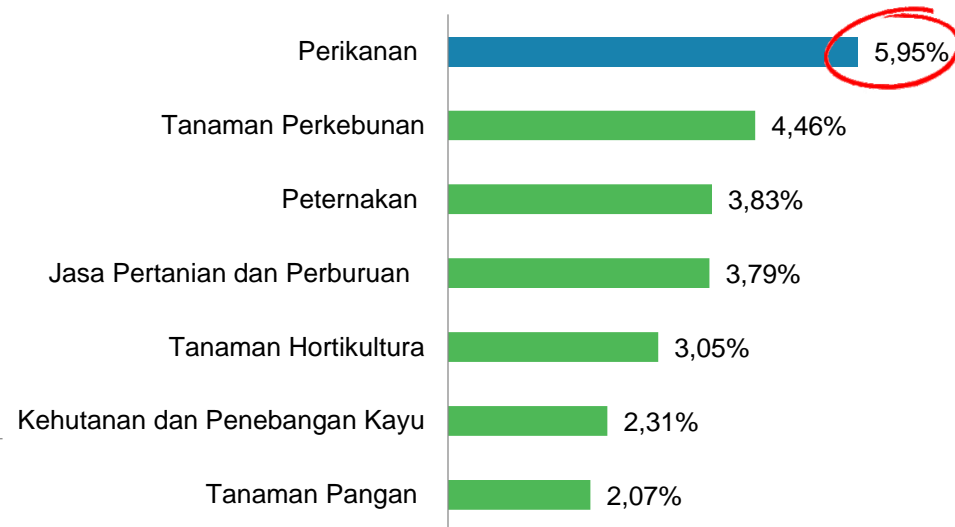
(Berdasarkan Harga Konstan)



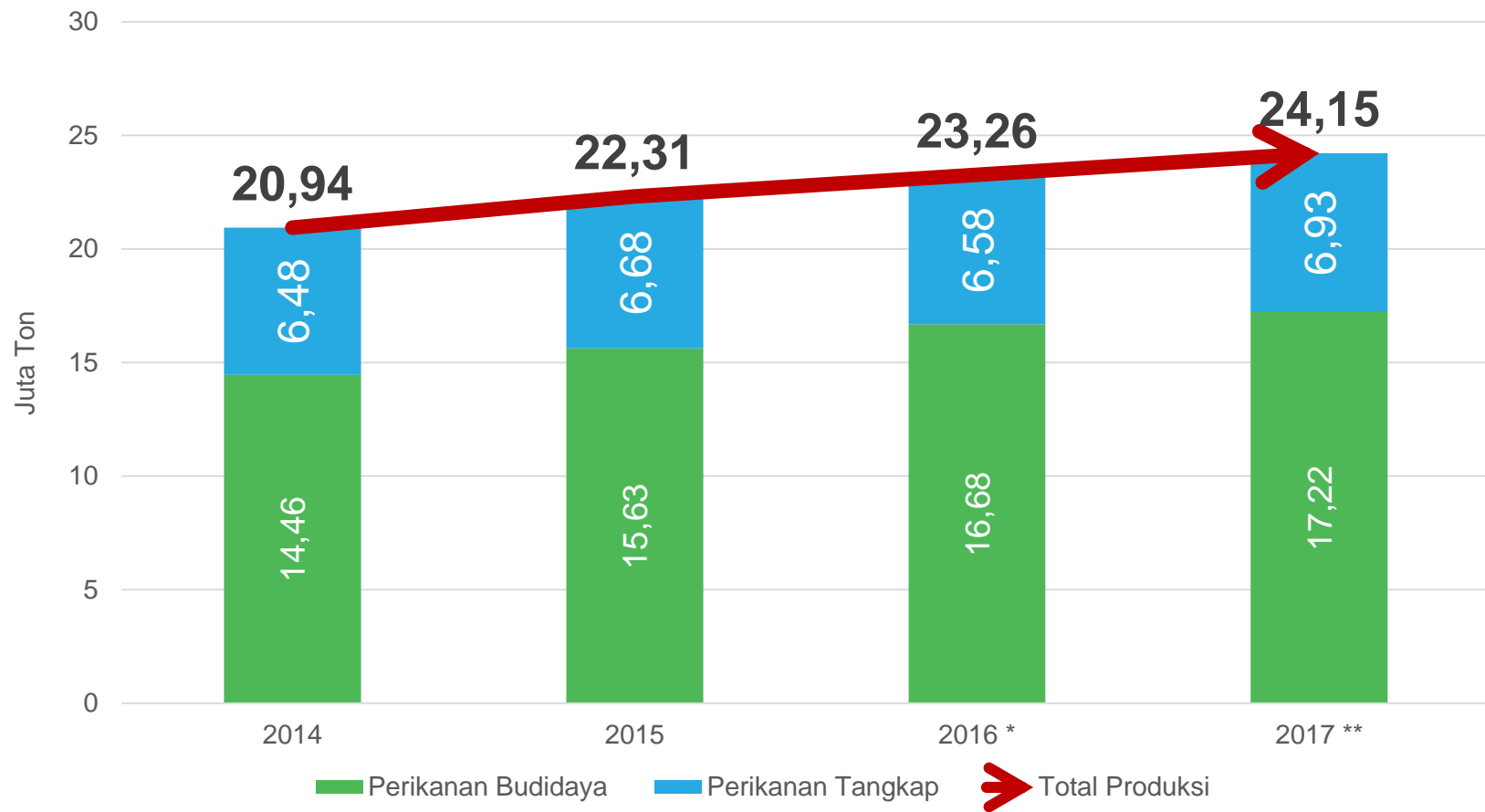
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Perbandingan Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian dalam Arti Luas Tahun 2017 (%)

(Berdasarkan Harga Konstan)



PRODUKSI PERIKANAN



* 2016 - angka sementara

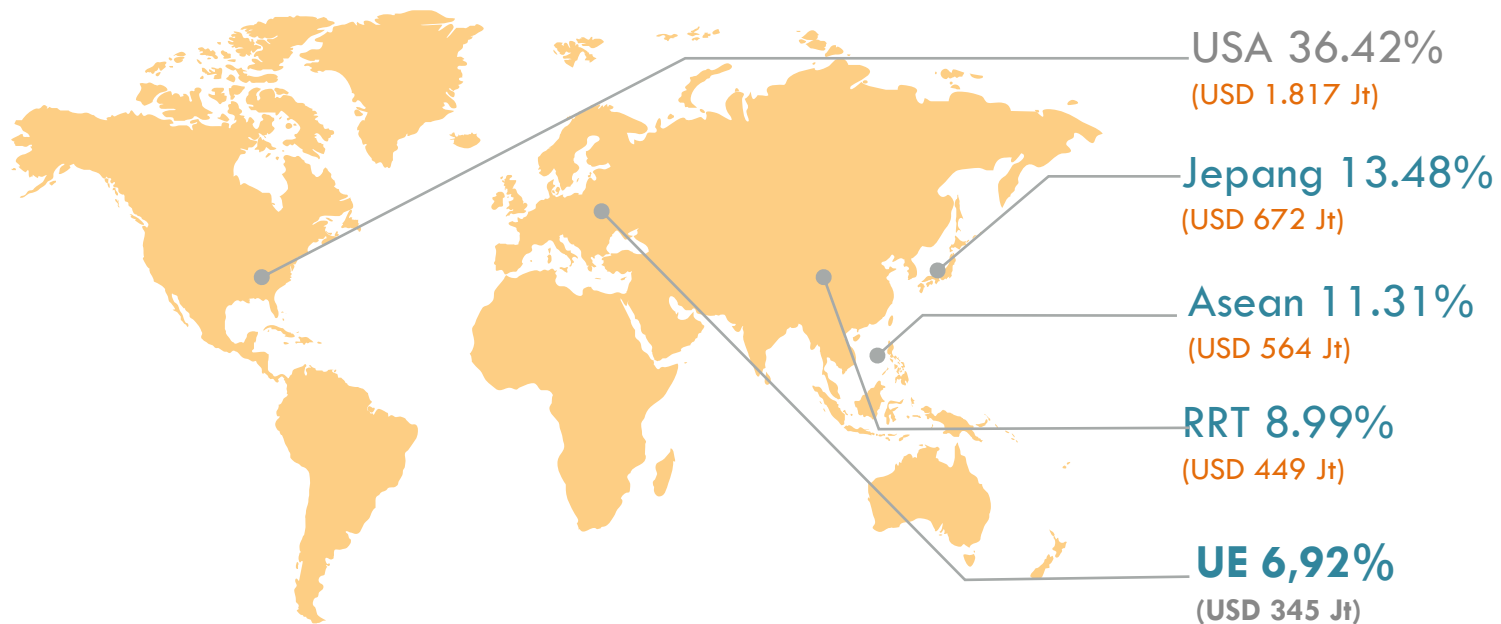
** 2017 - angka sangat sementara

***2018 - angka sangat sangat sementara

Tujuan Pasar Utama Hasil Perikanan Indonesia

Tahun 2017

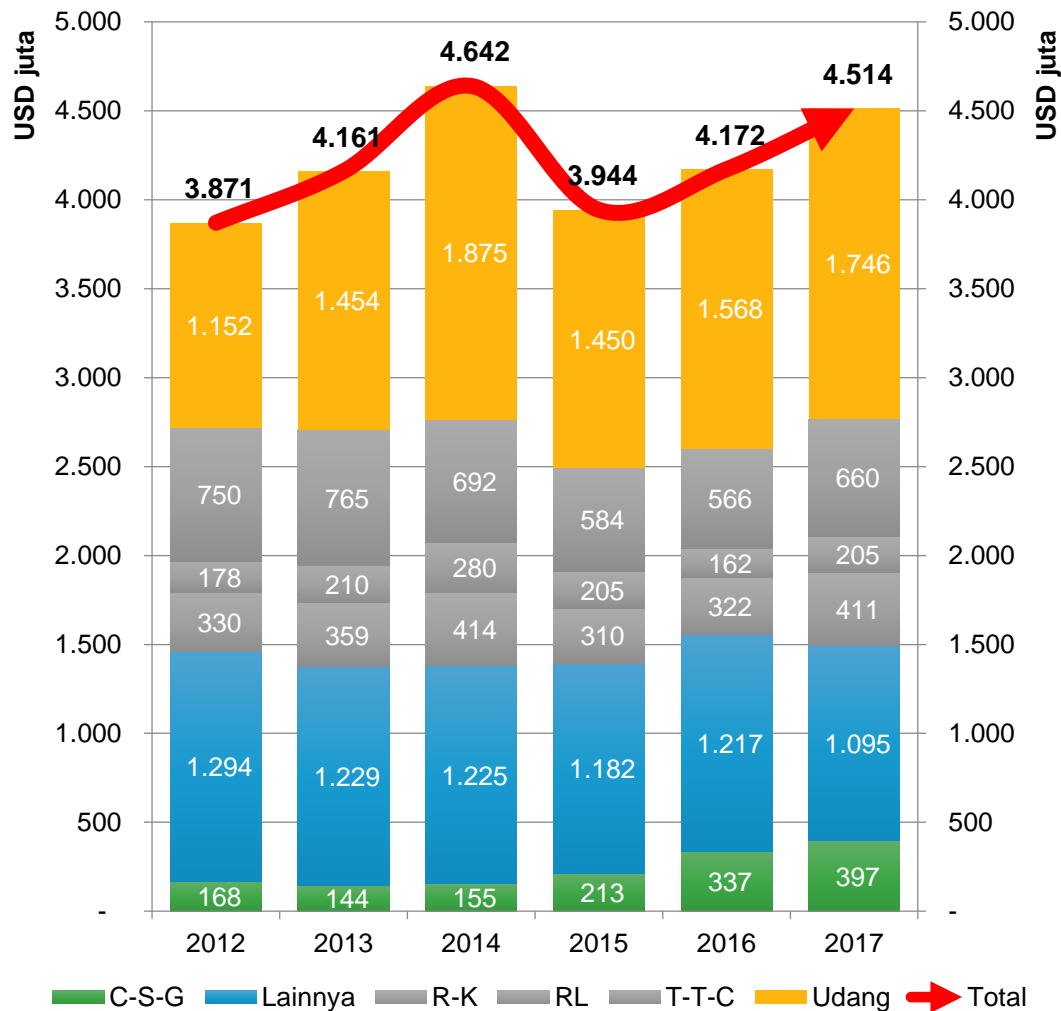
(USD 4.514 JUTA*)



SUMBER: BPS DIOLAH DITJEN PDS
DATA SEMENTARA SAMPAI BULAN DESEMBER 2017

Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas Utama

Tahun 2012-2017 *



Sumber: BPS diolah Ditjen PDS-KKP

* Data sementara sampai dengan Desember 2017

Tahun 2012-2017

- **Mengalami kenaikan**
 1. Cumi-Sotong-Gurita (CSG) 21.41% per tahun
 2. Udang 10.40% per tahun
 3. Rajungan-Kepiting (RK) 6.15% per tahun
 4. Rumput Laut (RL) 6.02% per tahun
- **Mengalami penurunan**
 - ✓ Tuna Tongkol Cakalang (TTC) 1.9% per tahun
 - ✓ Jenis ikan lainnya 3.20% per tahun

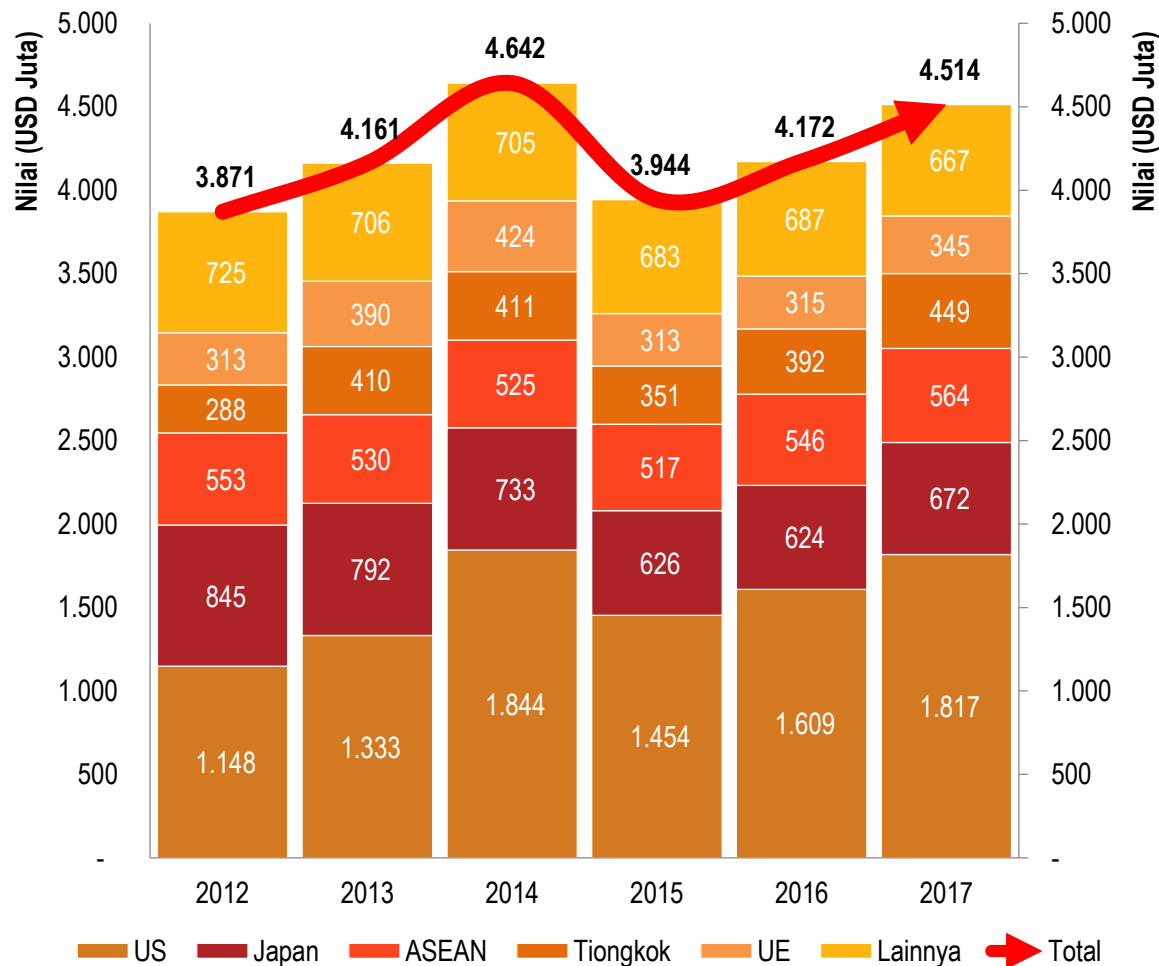
Tahun 2016-2017

- **Mengalami kenaikan**
 1. Rajungan-Kepiting (RK) 27.81%
 2. Rumput Laut (RL) 26.69%
 3. Cumi-Sotong-Gurita (CSG) 17.70%
 4. Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) 16.57%
 5. Udang naik 11.31%
- **Mengalami penurunan**
 - ✓ Jenis Ikan lainnya 10.03%

* Produk udang pada tahun 2017 tidak termasuk kerupuk dan pasta udang karena perubahan kode HS 2017, pada tahun 2016 produk tersebut mencapai volume 23.62 ribu ton dengan nilai USD 123.85 juta

Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Negara Tujuan

Tahun 2012-2017 *



Tahun 2012-2017

- Mengalami kenaikan:
 - ✓ Amerika Serikat 11.38% per tahun
 - ✓ China 10.80% per tahun
 - ✓ Uni Eropa 3.52%
 - ✓ Asean 0.45% per tahun
- Mengalami penurunan
 - ✓ Jepang 4.19% per tahun
 - ✓ Negara lainnya 1.62% per tahun

Tahun 2016-2017

- Mengalami kenaikan:
 - ✓ China 14.47%
 - ✓ Amerika Serikat 12.92%
 - ✓ Uni Eropa 9.69%
 - ✓ Jepang 7.81%
 - ✓ Asean 3.28%
- Mengalami penurunan
 - ✓ Negara lainnya 2.94%

Sumber: BPS diolah Ditjen PDS-KKP (474 produk HS 10 digit 2012 dan 484 produk HS 8 Digit 2017)

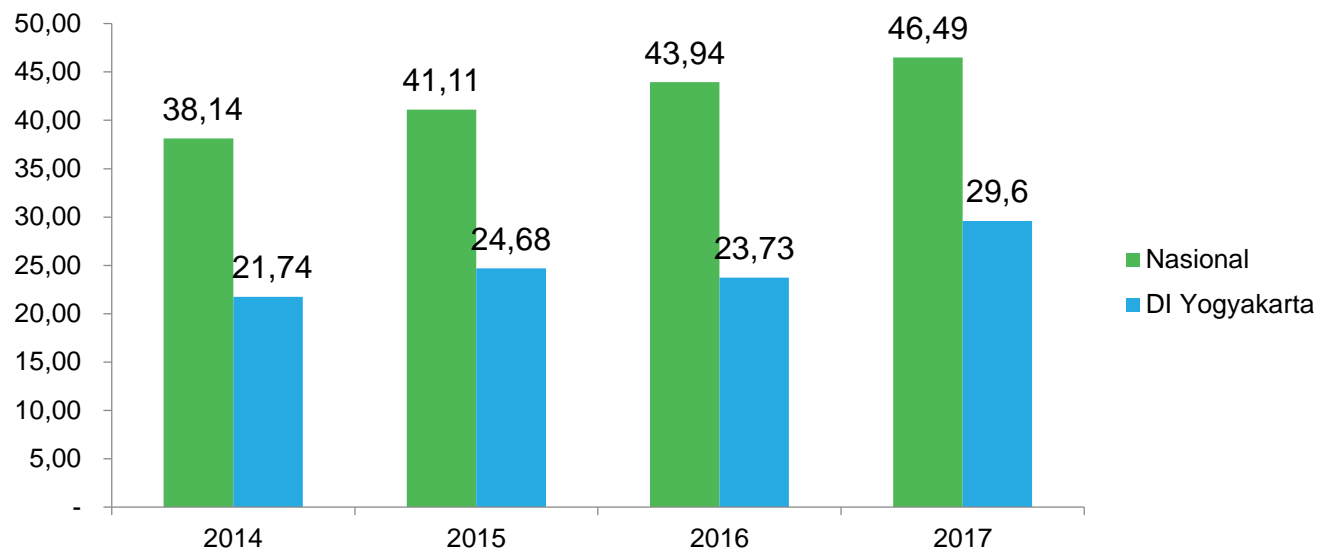
* Angka sementara 2017



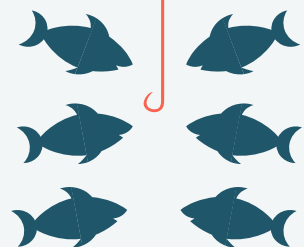
KONSUMSI IKAN

Angka Konsumsi Ikan
Penduduk DI Yogyakarta
masih perlu ditingkatkan

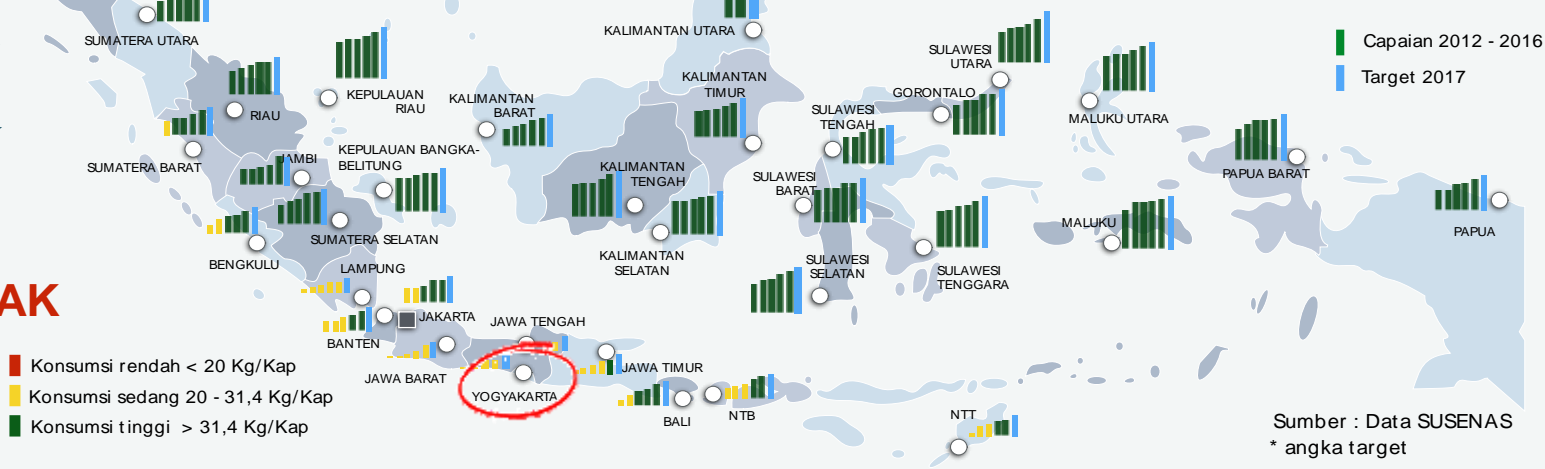
Konsumsi Ikan Nasional dan DI Yogyakarta Per Tahun (Kg/Kap/Tahun) 2014-2017*



KONSUMSI IKAN, 2012 - 2017* (Kg/ kapita)



#IKANITUENAK



Sumber : Data SUSENAS
* angka target

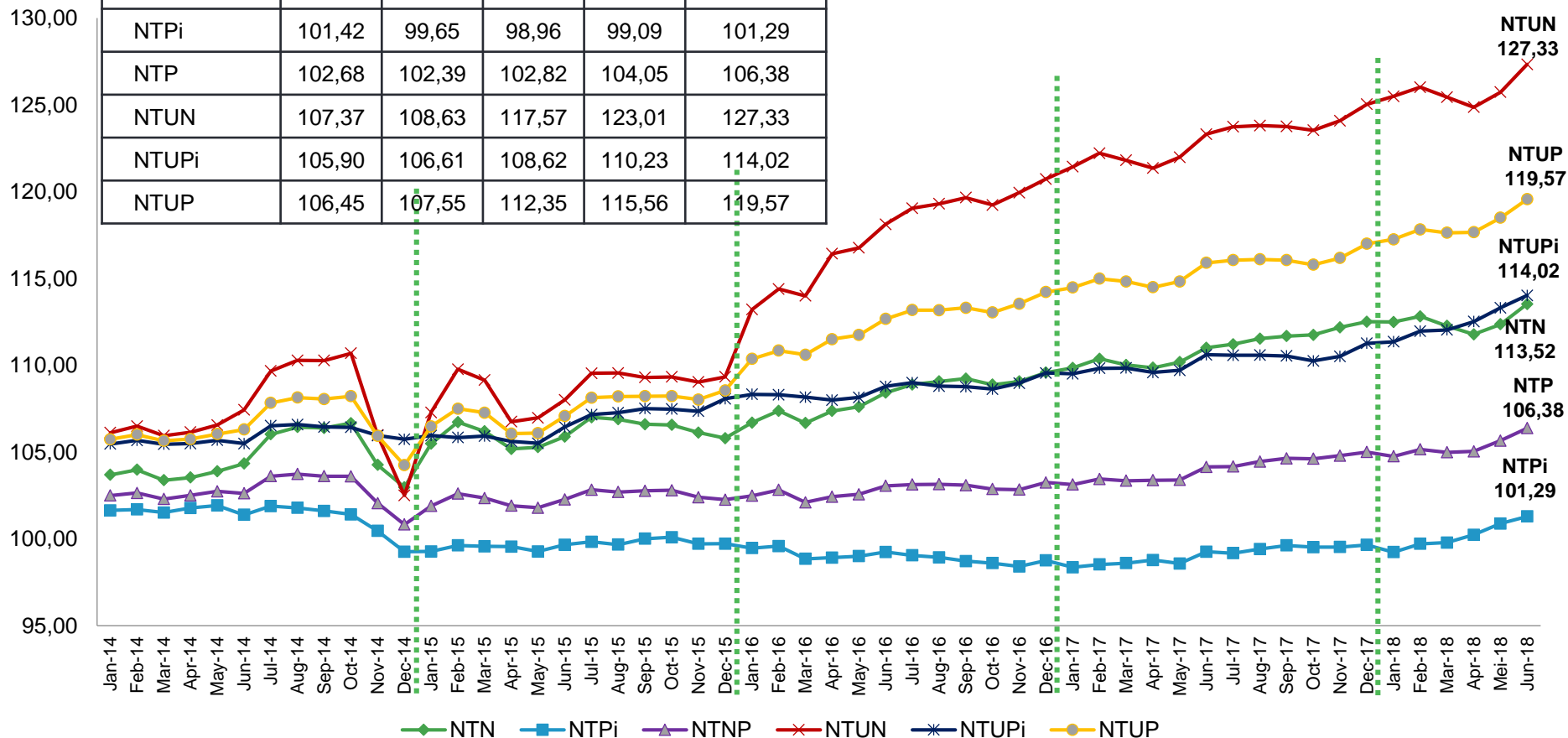
Sumber : Susenas, diolah oleh Ditjen PDS

* Angka Sementara 2017, Ditjen PDS



NILAI TUKAR RATA-RATA PER TAHUN

NT Rata-Rata	2014	2015	2016	2017	Juni 2018
NTN	104,63	106,14	108,24	109,86	113,52
NTPi	101,42	99,65	98,96	99,09	101,29
NTP	102,68	102,39	102,82	104,05	106,38
NTUN	107,37	108,63	117,57	123,01	127,33
NTUPi	105,90	106,61	108,62	110,23	114,02
NTUP	106,45	107,55	112,35	115,56	119,57

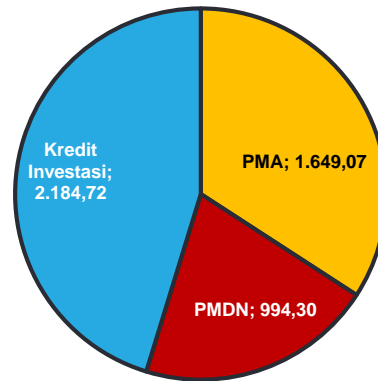
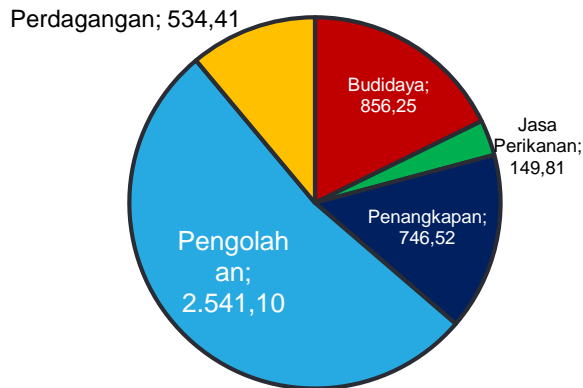


NTN : Nilai Tukar Nelayan
 NTPi : Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
 NTP : Nilai Tukar Perikanan
 NTUN : Nilai Tukar Usaha Nelayan
 NTUPi : Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan
 NTUP : Nilai Tukar Usaha Perikanan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Investasi Tahun 2017

Investasi Sektor Perikanan menurut Bidang Usaha dan Sumber Dana Rp 4,83 Triliun

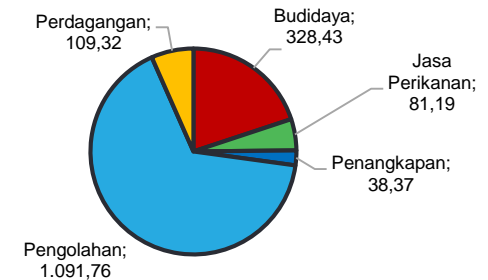


- Investasi KP didominasi bidang pengolahan sebesar Rp 2,54 Triliun (52,63%), diikuti oleh bidang produksi (tangkap dan budidaya) Rp 1,60 Triliun (33,20%)
- Sumber Investasi berasal dari Kredit Investasi Rp 2,18 Triliun (45,25%), PMA Rp 1,65 Triliun (34,16%), dan PMDN Rp 0,99 Triliun (20,59%)

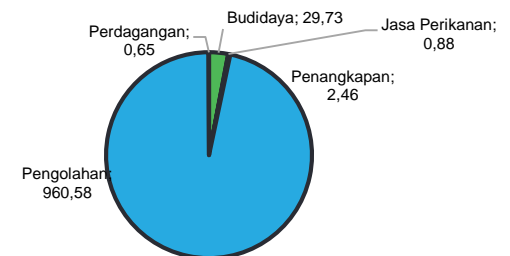
Sumber: BKPM dan OJK, diolah Ditjen PDS-KKP

- Pada TW III-2017 terdapat realisasi PMA di bidang usaha penangkapan sebesar Rp 346 Miliar, setelah validasi dengan BKPM realisasi PMA dimaksud adalah realisasi PMA Tahun 2014.

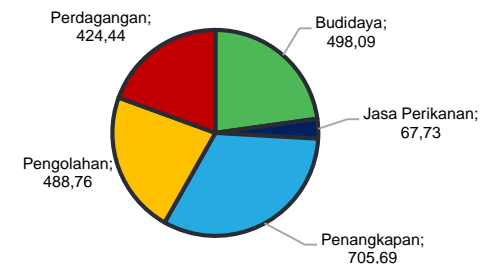
PMA (Rp 1,65 Triliun)



PMDN (Rp 994,30 Miliar)

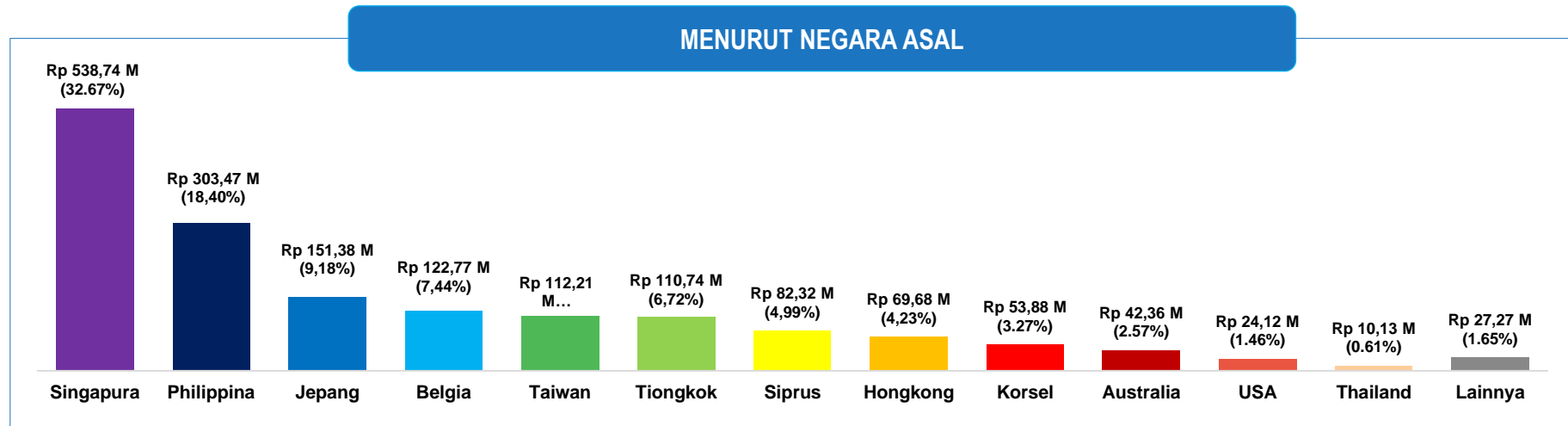
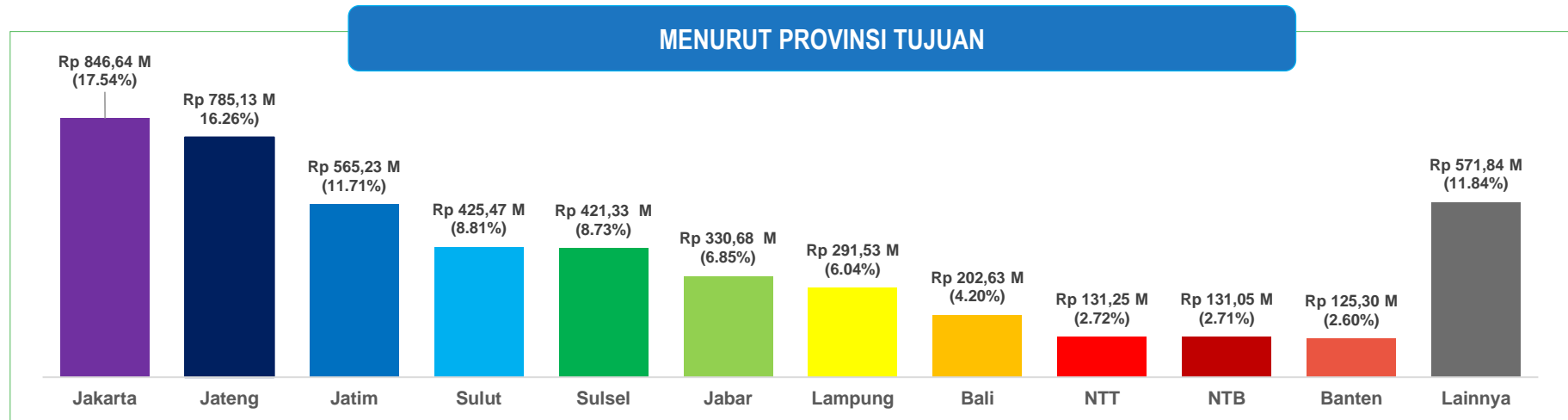


Kredit Investasi (Rp 2,18 Triliun)



Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Menurut Provinsi dan Negara Asal



Sumber: BKPM dan OJK, diolah Ditjen PDS-KKP

* Pada TW III-2017 terdapat realisasi PMA di bidang usaha penangkapan sebesar Rp 346 Miliar, setelah validasi dengan BKPM realisasi PMA dimaksud adalah realisasi PMA Tahun 2014.



Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

(sd triwulan IV)



Perbankan

Nilai Realisasi Kredit :
Rp. 6,49 Trilyun



Realisasi Jumlah Debitur :
59.702 Debitur



Rasio *Non Performing Loan* (NPL)
2,17 %



Non Bank



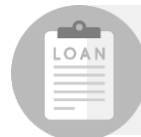
Nilai Realisasi Pembiayaan :
Rp. 535,39 Milyar



Realisasi Jumlah Debitur :
4.797 Debitur



Rasio *Non Performing Financing* (NPF) :
1,93 %



- Total Permodalan tahun 2017: Rp. 7,03 Trilyun (234% dari target Rp. 3 Trilyun)
- Pertumbuhan kredit SKP sebesar 14,7% melebihi target OJK tahun 2017 sebesar 8-10%.



TERIMA KASIH